

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2026



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2015-2019 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao. Rencana strategis ini merupakan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan yang disesuaikan dengan pagu indikatif, sehingga secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program Badan Kesbangpol.

Visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program Kantor Kesbangpol, sebagaimana tertuang dalam rencana strategis tahun 2015-2019 harus diketahui, dihayati dan selanjutnya diimplementasikan secara sistematis dan terukur dilapangan oleh seluruh jajaran di lingkungan Kesbangpol. Untuk maksud tersebut kepada semua Kepala Bidang dan Staf lingkup Kesbangpol Kabupaten Rote Ndao harus menjabarkan rencana strategis ini dalam bentuk program yang operasional dan menunjukan keterkaitan serta keterpaduan antar berbagai kegiatan baik dalam lingkup Kesbangpol maupun antar SKPD terkait. Dengan demikian, Renstra Kesbangpol merupakan jawaban dari masalah sekaligus lanka-langkah mengatasinya yang tercermin dari program dan kegiatan kesbangpol kedepan.

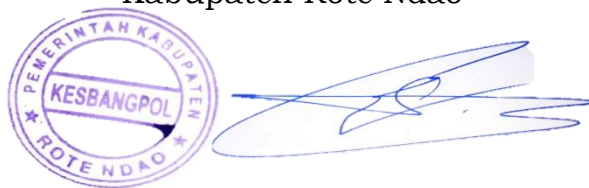
Diharapkan kepada semua pihak yang terkait dengan Kesbangpol dapat memanfaatkan Renstra ini sebagai acuan dan masukan terutama dalam meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan Badan Kesbangpol.

Kami menyadari bahwa Rencana Strategis ini belum sempurna dan memerlukan masukan dari semua pihak untuk perbaikan dan penyempurnaannya.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan Rencana Strategis ini.

Baa, 30 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao



Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk. I

Nip. 19701217 200312 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	12
1.3	Maksud dan Tujuan	14
1.4	Sistematika Penulisan	15
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi pelaksanaan renja Peragkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Peragkat Daerah	22
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	24
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH2	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	30
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Peragkat Daerah	31
3.3	Program dan Kegiatan	32
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB V	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Rote Ndao merupakan garda terselatan Indonesia yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan bahasa, menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga dan memperkuat kesatuan bangsa serta stabilitas politik. Dalam konteks ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran strategis dalam membangun fondasi yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perkembangan dinamika sosial dan politik baik di tingkat Regional maupun Nasional menuntut Bakesbangpol untuk terus beradaptasi dan berinovasi guna menjaga keutuhan dan keamanan negara. Globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan paradigma politik menjadi faktor-faktor yang memerlukan respons yang efektif dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra Bakesbangpol menjadi kebutuhan mendesak untuk memberikan arah dan strategi yang jelas dalam menghadapi perubahan zaman. Dengan merumuskan visi dan misi yang kuat, Kesbangpol berkomitmen untuk menjalankan peran dan fungsi dengan optimal, serta meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat sipil, lembaga pemerintah, dan unsur-unsur lainnya.

Dalam konteks ini pula, Renstra Bakesbangpol diarahkan untuk menjawab berbagai isu krusial, seperti radikalisme, intoleransi, konflik horizontal, dan tantangan lain yang dapat mengancam persatuan dan keamanan nasional. Dengan merinci langkah-langkah strategis dan mengidentifikasi indikator keberhasilan, Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mencapai tujuan Bakesbangpol dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sejalan dengan semangat reformasi dan tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Renstra Kesbangpol diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan memberikan kontribusi positif bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera dan Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT.

RENSTRA Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajiin dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau RPJMD dan bersifat indikatif. Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019-2024. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada Tahun 2024, maka Bupati menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 dan memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2026. Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao melakukan penyusunan dokumen Renstra PD Tahun 2025-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Selanjutnya, Melalui penyusunan Renstra Bakesbangpol Rote Ndao Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dan tahun 2026 dan juga diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dan menjaga keutuhan bangsa, serta memperkuat fondasi demokrasi dan supremasi hukum

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Rote Ndao Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao;

21. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao;
22. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Bakesbangpol selama kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026.

1.3.2. Tujuan

Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 disusun dengan tujuan:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan Sub kegiatan pembangunan untuk jangka waktu dua tahun ke depan sesuai tugas dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian tupoksi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao.
- c. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas Pembinaan Politik , Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini di daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

- 1.1 Latar belakang: mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPD.
- 1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.3 Maksud dan tujuan:
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
- 1.4 Sistematika penulisan:
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup:

- 2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah: memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).
- 2.2 Sumber daya Perangkat Daerah: memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, sarana prasarana, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah: bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Permasalahan utama, permasalahan dan akar masalah)
- 3.2 Isu Strategis
Hasil Identifikasi permasalahan digunakan sebagaia bahan kajian dalam merumuskan isu strategis perangkat daerah untuk periode Renstra Tahun 2025-2026

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
Memuat tentang perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
- 4.2. Cascading kinerja perangkat daerah mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam dua tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Rote Ndao 2025-2026.

7.2. Target Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang akan dicapai dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja daerah dalam RPD Tahun 2025-2026.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAKESBANGPOL KABUPATEN ROTE NDAO

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan Bakesbangpol mempunyai tugas pokok: **“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”**.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi di bidang Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi pemeliharaan ketahanan ekonomi, social, dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Rote Ndao sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Rote Ndao;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao; dan
- f. Pelaksaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bakesbangpol merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Bakesbangpol, mempunyai Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Struktur Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang yakni Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2. Sekretaris

Sekretaris, membawahi 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Analisis Keuangan Pusat/Daerah (Perencana, Keuangan dan Aset)

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik membawahi 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bakesbangpol. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Pengoordinasian kebijakan, di Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri , Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. Pelaksanaan pengendalian , pengawasan dan evaluasi di Sekretariat , Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri , Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- d. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bakesbangpol membawahi Sekretaris, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan karakter bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri , Bidang Ketahanan ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

2. Sekretaris

Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bakesbangpol dan Sekretaris membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah , Sub Koordinator Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretarias mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan operasional sekretariat berdasarkan rencana Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao;
- b. Perencanaan kebijakan operasional di Sekretariat;
- c. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Analis Keuangan Pusat/Daerah (Sub Koordinator Substansi Keuangan dan Aset) dan Sub Koordinator Substansi Perencanaan Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

- 1) **Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian** : merencanakan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian melalui penyiapan ketatausahaan, perlengkapan, urusan rumah tangga, perjalanan badan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat
 1. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan langkah-langkah operasional sekretariat dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 2. membagi tugas kepada bawahan dan membimbing pelaksanaan tugas bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 3. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB), Analis Beban Kerja (ABK), Standar Kopetensi Jabatan, Standar Kopetensi Teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;

4. menyusun dan mengevaluasi pelaksanaan budaya kerja dan kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya etos kerja yang tinggi serta pengelolaan administrasi yang optimal, ekonomis, bermanfaat dan memuaskan;
5. mengendalikan pelaksanaan penataan surat-menyurat, urusan rumah tangga, ketatalaksanaan dan kepegawaian, pengelolaan perlengkapan kantor, penataan arsip dan pengaturan ruang kerja serta kebersihan/keamanan kantor;
6. mengendalikan pelaksanaan pengamanan kantor pada jam dinas maupun di luar jam dinas agar terjamin keamanan sarana dan prasarana gedung kantor;
7. memberikan layanan hubungan masyarakat kepada instansi/pihak terkait secara transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;
8. mengendalikan dan memeriksa pengumpulan data penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan pengusulan KARPEG, KARSU/KARIS, Kartu Indonesia Sehat(KIS)/BPJS, TASPEN dan BAPERTARUM ASN serta satya lencana agar tersedia data usulan yang valid;
9. menerima dan mengoreksi bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti pegawai, model C dan SKP pegawai agar tertib administrasi kepegawaian;
10. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional, tugas belajar dan ijin belajar agar pengusulan tepat waktu;
11. mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan daftar hadir harian sebagai pembinaan disiplin pegawai;
12. menyiapkan penyusun telaahan staf, informasi staf, saran dan pendapat kepada Bupati terkait kebijakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di daerah;
13. melakukan konsultasi pelaksanaan tugas/kegiatan dengan atasan langsung/instansi terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

14. melakukan penilaian kinerja, perilaku dan pembinaan disiplin serta memotivasi bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terciptanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, disiplin, profesional dan bermoral;
15. memeriksa hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan – kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.

3. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Kepala Bidang Ideologi , Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa Merumuskan visi , misi dan tujuan ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa dan mengidentifikasi isu-isu terkait ideologi, wawasan kebangsaan, karakter bangsa yang perlu ditangani serta mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk memperkuat ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di dalam masyarakat :

- 1) mengoordinir penyusunan rencana operasional dilingkungan bidang berdasarkan program kerja Badan Kesbangpol serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mempelajari dan memahami esensi dan nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai dasar negara;
- 3) mengembangkan strategi untuk memperkuat pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila di seluruh lapisan masyarakat;
- 4) mengidentifikasi dan menganalisis tantangan, perubahan sosial, dan isu-isu yang dapat mempengaruhi ideologi Pancasila;
- 5) merumuskan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengkomunikasikan, menyebarkan, dan mempromosikan ideologi Pancasila;
- 6) mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan tradisi nasional;
- 7) mengembangkan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan kesadaran akan identitas nasional;
- 8) mempromosikan kesadaran akan pentingnya keberagaman dan kerukunan dalam masyarakat multikultural;

- 9) membangun kesadaran akan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang diharapkan dari warga Negara;
- 10) mengembangkan program pembinaan karakter yang mengutamakan integritas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, keberanian, dan semangat kebangsaan;
- 11) melakukan pendekatan kolaboratif dengan lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun karakter bangsa yang kuat;
- 12) mengawasi implementasi program-program yang berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa;
- 13) mengkomunikasikan nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa kepada masyarakat luas;
- 14) menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta;
- 15) menggunakan media massa, publikasi, seminar, dan kampanye sosial untuk menyampaikan pesan-pesan yang relevan;
- 16) menjadi narasumber dan juru bicara dalam berbagai forum diskusi dan acara yang berhubungan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi Kelompok jabatan Fungsional.

4. Bidang Politik Dalam Negeri

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Merumuskan visi , misi dan tujuan Politik Dalam Negeri dan mengidentifikasi isu-isu terkait Politik yang perlu ditangani serta mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk memperkuat Politik di dalam masyarakat :

- 1) menganalisis situasi politik dalam negeri dan mengidentifikasi isu-isu politik yang relevan;
- 2) mengembangkan strategi dan rencana aksi untuk mengatasi isu-isu politik yang timbul dan memperkuat stabilitas politik dalam negeri;
- 3) melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan politik dalam negeri, termasuk pemilihan umum, kebijakan publik, dan proses pembuatan keputusan politik;

- 4) melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan politik dalam negeri, termasuk pemilihan umum, kebijakan publik, dan proses pembuatan keputusan politik;
- 5) melakukan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan politik dalam negeri, termasuk pemilihan umum, kebijakan publik, dan proses pembuatan keputusan politik;
- 6) menyusun mekanisme pengawasan dan evaluasi kebijakan politik untuk memastikan keberhasilan implementasi dan efektivitas kebijakan;
- 7) mengoordinir dengan lembaga dan instansi terkait, seperti partai politik, lembaga pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok masyarakat, untuk memperkuat koordinasi dalam rangka mencapai tujuan politik yang diinginkan;
- 8) membangun dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan dalam bidang politik, baik di dalam maupun di luar negeri;
- 9) mengkomunikasikan kebijakan dan program politik kepada masyarakat luas melalui media massa, publikasi, dan kampanye sosial;
- 10) meningkatkan kesadaran politik masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses politik, seperti pemilihan umum dan konsultasi publik;
- 11) mewakili dan menjadi juru bicara Bidang Politik Dalam Negeri dalam berbagai forum dan pertemuan politik;
- 12) menginisiasi dan mengkoordinasikan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan politik dalam negeri, termasuk studi kebijakan, analisis politik, dan riset kebijakan publik;
- 13) menerapkan metodologi penelitian yang relevan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam pengembangan kebijakan politik;
- 14) menganalisis hasil penelitian dan menggunakan temuan tersebut untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam bidang politik dalam negeri;
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- 16) melakukan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi partai politik dalam rangka pengajuan dana bantuan partai politik;

- 17) melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan politik dalam daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang membawahi Kelompok jabatan Fungsional.

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat.

- 1) melakukan pemantauan terhadap kondisi ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor ekonomi kunci;
- 2) mendorong dan mendukung inovasi, investasi, dan pengembangan usaha untuk memperkuat sektor ekonomi;
- 3) melakukan pemetaan dan analisis terhadap keragaman sosial budaya yang ada di dalam masyarakat;
- 4) merumuskan kebijakan dan program untuk memperkuat hubungan antar kelompok sosial budaya, menjaga harmoni sosial, dan mendorong inklusi sosial;
- 5) mengkoordinasikan kegiatan yang mendukung pelestarian dan pengembangan seni, budaya, tradisi, dan warisan nasional;
- 6) mengembangkan kebijakan dan program untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama dan menjaga kebebasan beragama;
- 7) melakukan dialog dan kerjasama dengan pemimpin agama dan komunitas keagamaan untuk mempromosikan pemahaman yang toleran dan saling menghormati;
- 8) mendukung pembentukan dan pengembangan organisasi masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok komunitas;
- 9) memberikan dukungan teknis dan kelembagaan kepada organisasi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka;
- 10) membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan;
- 11) mengkomunikasikan kebijakan dan program dalam bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, dan organisasi masyarakat kepada masyarakat luas;

- 12) menggalang dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta;
- 13) menjadi narasumber dan juru bicara dalam berbagai forum diskusi dan acara yang berhubungan dengan bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, dan organisasi masyarakat;
- 14) menganalisis hasil penelitian dan menggunakan temuan tersebut untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam bidang politik dalam negeri

6. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik

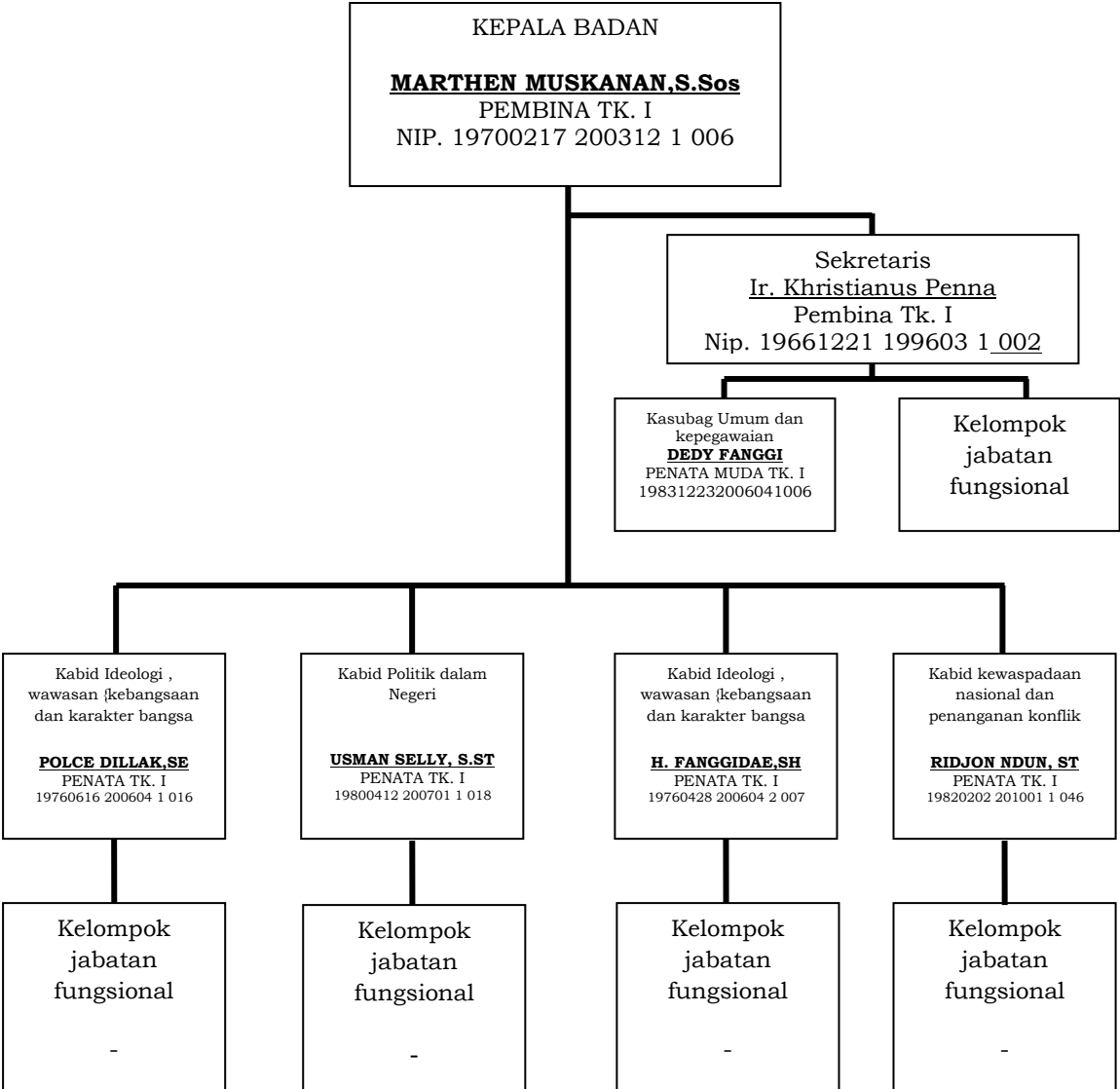
- 1) merumuskan kebijakan dan strategi kewaspadaan nasional untuk menghadapi berbagai ancaman keamanan dan penanganan konflik;
- 2) membangun kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dan memastikan kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi negara;
- 3) melakukan analisis mendalam terhadap potensi ancaman keamanan baik dari dalam maupun luar negeri yang dapat membahayakan stabilitas nasional;
- 4) melakukan pemantauan situasi politik, keamanan, dan perkembangan terkini di dalam maupun di luar negeri;
- 5) mengembangkan rencana penanganan konflik dan krisis untuk meminimalkan dampak negatifnya terhadap stabilitas nasional;
- 6) melakukan pemantauan situasi konflik dan krisis yang mungkin terjadi, serta koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya penyelesaian konflik dan pemulihan pasca-krisis;
- 7) membangun kerja sama dan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, militer, intelijen, dan lembaga pemerintah lainnya untuk memastikan penanganan ancaman keamanan dan konflik berjalan efektif;
- 8) membangun kerja sama dan koordinasi dengan lembaga internasional terkait dengan kerja sama global dalam bidang keamanan;

- 9) mendorong peningkatan kapasitas keamanan nasional melalui pelatihan, pengembangan, dan peningkatan kemampuan personil keamanan dalam menghadapi ancaman dan konflik. termasuk pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung keamanan nasional;
- 10) memantau perkembangan global yang dapat berdampak pada keamanan nasional, termasuk perubahan politik, konflik internasional, dan perkembangan teknologi terkait keamanan yang dapat digunakan untuk memperbarui kebijakan dan strategi keamanan nasional;
- 11) berperan sebagai juru bicara dan advokat kebijakan keamanan nasional di hadapan publik dan lembaga pemerintah lainnya dan melakukan komunikasi yang efektif untuk menjelaskan kebijakan dan tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
- 12) mengoordinir pelaksanaan kerjasama kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing dan kewaspadaan perbatasan antar negara;
- 13) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 14) menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan.

2.1.2. Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka struktur organisasi Tahun 2024 seperti gambar berikut:

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024



Sumber data: Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

2.2. Sumber Daya Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

Dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao didukung dengan sumberdaya yang terdiri dari 2 (dua) macam yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia, berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pendidikan yang diikuti baik pendidikan formal maupun non formal merupakan aparatur pemerintah yang meliputi Kepala Badan, Kepala Bidang, yang melaksanakan kegiatan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao. Berdasarkan data terakhir Januari 2024 jumlah pegawai tetap (PNS) Bakesbangpol sebanyak 16 (enam belas) orang dengan perincian pengisian golongan ruang, pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan jabatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 sampai dengan Tabel 2.3,

Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao saat ini berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) orang laki-laki dan 4 (empat) orang perempuan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bapelitbangda Kab. Rote Ndao
Berdasarkan Pangkat / Golongan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk. I	2	-	2
Jumlah Golongan IV			2	-	2
2	III/d	Penata Tk I	3	1	4
3	III/b	Penata Muda Tk I	2	2	4
4	III/a	Penata Muda	1	0	6
Jumlah Golongan III			6	3	9
5	II/d	Pengatur Tk. I	1	1	2
6	II/c	Pengatur	2	-	2
7	II/a	Pengatur Muda	1	-	1
Jumlah Golongan II			4	1	5
TOTAL			12	4	16

Sumber Data : Bakesbangpol Kab. Rote NdaoTahun 2024

Tabel 2.1. menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rote Ndao sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri dari golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 6 (enam) orang dan golongan II sebanyak 4 (empat) orang. Sedangkan keadaan pegawai Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S3	-	-	-
2	S2	-	-	-
3	S1	8	2	10
4	D III	-	1	1
5	SLTA/SMK	5	-	5
Total		13	3	16

Sumber Data : Bapelitbangda Kab. Rote Ndao Tahun 2024

Tabel 2.2. menunjukkan bahwa jumlah ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao sebanyak 16 (enam belas) orang terdiri dari pendidikan, S1 berjumlah 10 (sepuluh) orang, DIII berjumlah 1 (satu) orang dan SLTA/SMK berjumlah 5 (lima) orang. Sedangkan susunan kepegawaian pada Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut:

Diagram 1.1 Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

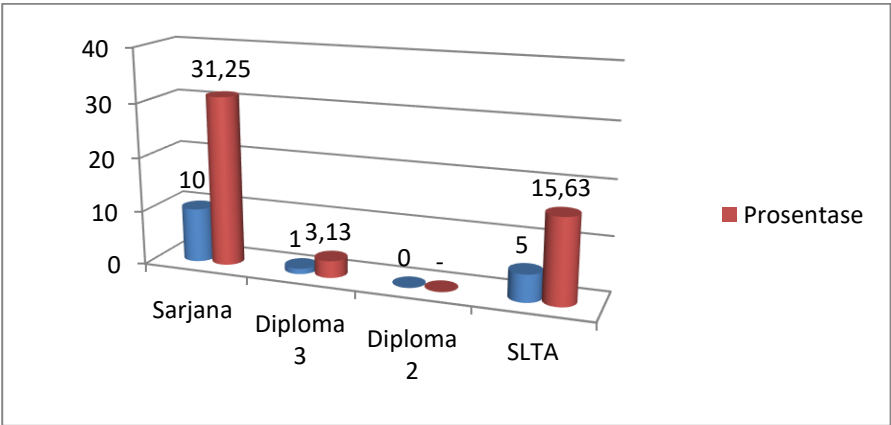


Diagram 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

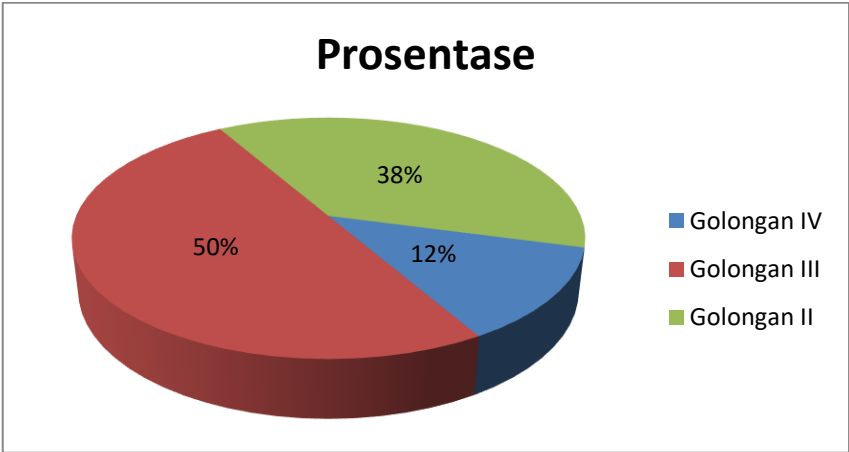
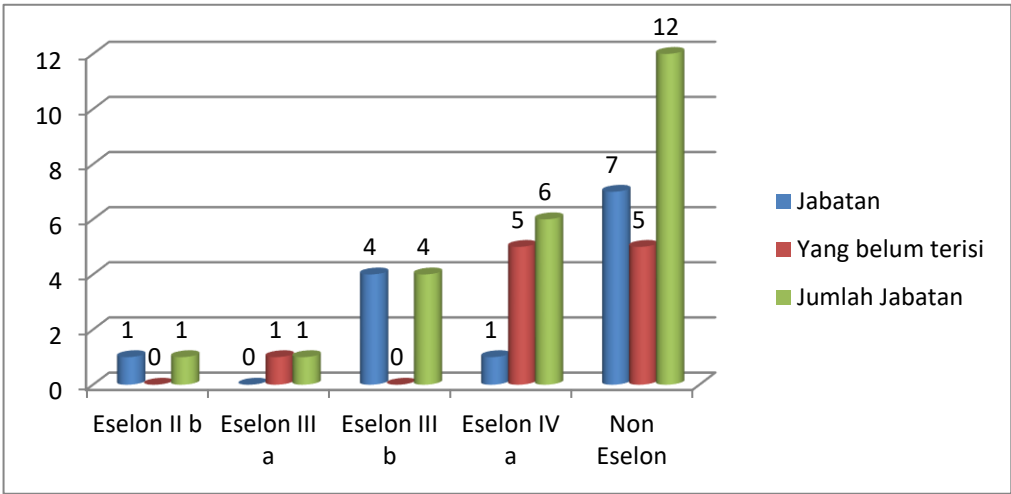


Diagram 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon



Tabel 2.3
Daftar Nominatif Pegawai Badan Kebangsaan dan Politik
Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Pendi dikan
1.	Marthen Muskanan, S.Sos/ 19700217 200312 1 006	Pembina Tk. I / IV-b	Kepala Badan	S1
2.	Ir. Khristian Penna / 19831223 200604 1 006	Pembina Tk. I / IV-b	Sekretaris	
3.	Hanny A. Fanggidae,SH/ 19760428 200604 2 007	Penata Tk.I / III-d	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama Dan Ormas	S1
4.	Polce Dillak, SE/ 19760616 200604 1 016	Penata Tk.I / III-d	Kabid Ideologi, Wasbang Dan Karakter Bangsa	S1
5.	Usman Selly, S.ST / 19800412 200701 1 018	Penata Tk.I / III-d	Kabid Politik Dalam Negeri	S1
6.	Ridjon Ndun, ST 19820202 201001 1 046	Penata Tk.I / III-d	Kabid Wasnas Dan Penanganan Konflik	S1
7.	Dedy Fanggi, SH 19831223 200604 1 006	Penata Muda Tk.I/ III b	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S1
8.	Maria M. Jemumut, A.Md/ 19780405 200904 2 006	Penata Muda Tk.I/ III-b	Pelaksana	D3
9.	Lestarie Balukh, S.Si/ 19870810200604 2 002	Penata Muda TK.I /III- b	Pelaksana	S1
10.	Hendrik Pello,SH/ 19760717 200604 2 002	Penata Muda TK.I /III-b	Pelaksana	S1
11.	Yulius M Sine/ 19740724 200501 1 008	Penata Muda/ III.a	Pelaksana	SLTA
12.	Alvred Tulle / 19780310 200701 1 014	Pengatur TK I/ II d	Pelaksana	SLTA
13.	Inge Fernandez / 19820822 200701 2 004	Pengatur TK I/ II d	Pelaksana	SLTA
14.	Burhanudin Mustafa / 19750108 201212 1 003	Pengatur / II c	Pelaksana	SLTA
15.	Simson M Hanas/ 19720506 200501 1 009	Pengatur / II c	Pelaksana	SLTA
16.	Ridwan Riwu/ 19820705 201212 1 010	Pengatur Muda / II a	Pelaksana	SLTA

2. Sarana dan Prasarana.

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan kegiatan perencanaan seperti gedung beserta ruang rapat yang memadai, fasilitas komputer beserta jaringan internet, meja, kursi, mobil dinas Kepala Badan /mobil operasional, peralatan kantor dan sumber daya pendukung lainnya.

Kelancaran Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao di dukung sarana, prasarana, peralatan kantor dan asset. berdasarkan data per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut:

TABEL 2.5 Daftar Aset

No	Merk/Tipe	No. Polisi	Tahun Pembelian	Jumlah	Ket
1.	Sepeda Motor/ Honda Supra Fit NF 100SLD	DH 5001 YU	2006	1 unit	Baik
2.	Sepeda Motor/ Honda Revo NPLI820MT	DH 5690 YU	2014	1 unit	Baik
3.	Sepeda Motor/ Yamaha YUPITER-ZCW I FI	DH 5902 VB	2018	1 unit	Baik
4.	Sepeda Motor/ Honda Revo Fit Warna Hitam	DH 5692 YU	2019	1 unit	Baik
5.	Sepeda Motor /Honda Beat	DH 3001 VB	2019	1 unit	Baik
6.	Mobil / Avanza Veloz 1,5 M/T	DH 205 YU	2014	1 Unit	Baik

No	Jenis Barang / Nama Barang	Merk/ Type	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1	Kunci Pas 1 set	Spana	1 set	Tidak ada
2	Rak kayu		1 unit	Ada/Baik
3	Rak Kayu Jati	Kayu Jati ex Lokal	1 unit	Ada/ KB
4	Rak Kayu	-	1 unit	Ada/Baik
5	Brand Kas	-	1 unit	Ada/Baik
6	White Board	-	1 unit	Ada/Baik
7	Lemari Kayu 3 Pintu	-	1 unit	Ada/KB
8	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1 unit	Ada/ Baik
9	Lemari Kayu 2 Pintu	-	1 unit	Ada/ Baik
10	Meja Kayu Rotan/ ½ Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
11	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
12	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
13	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/KB
14	Meja Biro	Kayu Jati	1 Unit	Ada/ Baik
15	Meja Kerja	½ Biro	1 Unit	Ada/Baik

16	Meja Kerja	Kayu Jati ex Lokal1/2 Biro	1 Unit	Ada/Baik
17	Meja Kerja	Kayu Jati	1 Unit	Ada/Baik
18	Sofa	Spon	1 Set	Ada /Kurang baik
19	Kursi Kerja	Kayu	1 Set	Ada/ baik
20	Kursi Kerja	Kayu Jati Jepara	1 set	Ada/ baik
21	Gorden Uk Tinggi 125 Cm X lebar 75 cm	Kain dan Tiang Gorden	1 set	Ada/baik
22	AC 1 Unit	Samsung 1 PC	1 Unit	Ada/baik
23	AC 1 Unit	Sharp 19UCY	1 Unit	Ada/baik
24	Tandon air/Tangki Fiber air 1100 Liter		1 Unit	Ada/baik
25	Laptop	Sony Valo/ Windows 8/ Lenovo	1 Unit	Ada/baik
26	Laptop	Processor Intel Inside ram 8/ Lenovo	1 Unit	Ada/baik
27	Laptop	Windows 10 ACER Processor Intel Core 13	1 Unit	Ada/baik
28	Laptop	Lenovo	1 Unit	Ada/baik
29	Computer PC	Alcatros / Processor	1 Unit	Ada /rusak
30	Printer	Brother/ MFC1625 DW	1 Unit	Ada/rusak
31	Printer	Canon Pxima MP 287	1 Unit	Ada/baik
32	Printer	Canon Pixma MX 497	1 Unit	Ada/baik
33	Printer	Canon PDMA Ip 2770	1 Unit	Ada/rusak
34	Selang penyemprot air	Polyesther	1 Set	Ada/ Baik
35	Masker Oksigen	Sarangan	1 Unit	Ada /KB
36	Kamera + Attachi Ment	Sony/ W 830	1 set	Ada /rusak
37	Proyektor+ Attachiment	BENQM 5506P	1 unit	Ada / baik
38	Microphone/WirelesMic	Toa	1 Unit	Ada /KB
39	Handycame	SONY CX 405	1 Unit	Ada/rusak
40	Mantel	Parasut	2 unit	Ada/1 unit rusak
41	Teropong	Binocular	1 Unit	Ada/Baik
42	Filling Cabinet	Brother	1 Bh	Ada/Baik
43	Kursi Plastik	Napolly	46 Bh	Ada/Baik
44	Kursi Tamu 4 set	Stainlles	2 Bh	Ada/Baik
45	AC	Panasonic	1 Bh	Ada/Baik
46	Gorden		40 L	Ada/Baik
47	Besi Gorden		81 M	Ada/Baik
48	Printer	Canon Pixma	3 Unit	Ada/Baik

Sumber Data :Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023

1.3.2. Bangunan Gedung/Badan

Adapun bangunan gedung yang tercatat pada Bakesbangpol yaitu :

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen
2. Bangunan Gudang tertutup permanen
3. Bangunan Instalasi lain lain
4. Bangunan Pos jaga permanen 2 unit

1.3.3. Tanah

Aset tanah pada Bakesbangpol adalah Tanah Hibah dari masyarakat pada tahun 2007 terdiri dari :

1. Tanah Bangunan pos jaga seluas 150 m² dengan harga
Rp. 1.500.000,-
2. Tanah Bangunan pos jaga seluas 80 m² dengan harga
Rp. 800.000,-

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian kinerja, anggaran dan realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao selama dilihat pada tabel 2.6 dan tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bakesbangpol Tahun 2021-2023

INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN	TARG ET SPM	TAR GET IKU	TAR GET IKK	TARGET INDIKAT OR LAINNYA	TARGET RENSTRA TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN				RASIO CAPAIAN PADA TAHUN		
					20 20	20 21	20 22	20 23		20 21	20 22	20 23		20 21	20 22	2023
1		2	3	4		5	6	7		8	9	10		11	12	13
Cakupan Pembinaan Idiologi wawasan kebangsaan		√	√	√		100	100	100		100	100	100		100	100	100
Persentase Ormas/LSM yang dibina		√	√	√		100	100	100		100	100	66		100	100	88,67
Persentase Partai Politik yang diverifikasi		√	√	√		100	100	100		100	90	90		100	100	93, 33
Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi		√	√	√		100	100	100		100	100	100		100	100	100

Tabel 2.7

Target dan Realisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2021 – 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke								
			2021		2022		2023		2021		2022		2023				
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3	4	8		9		10		13		14		15				
				-													
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	100	%	1.076.236.010	100	%	1.107.884.300	100	%	1.120.546.000	100	1.029.473.915	100	1.031.566.822	100	1.112.791.188
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Kantor	100	%		100	%		100	%		100		100	%		100
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14	Dok	19.977.000	19	Dok	30.000.000	19	Dok	6.970.000	19	19.770.000	19	29.975.000	19	6.800.000
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Renja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD	14	Dok	14.987.000	12	Dok	20.000.000			6.970.000	12	14.790.000	12	19.995.000		6.800.000
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12	Dok							12	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan	7	Dok	4.990.000	7	Dok	10.000.000			-	7	4.980.000	7	9.980.000		-
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7	Laporan							7	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9	Org/Bln	602.679.000	9	Org/Bln	652.679.000	13	Org/Bln	776.307.000	9	560.052.548	27	588.544.926	27	770.657.013
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	9	Bulan	530.944.800	9	Org/Bln	551.879.000			727.666.998	9	496.052.548	27	529.348.510		722.397.013
		Tersedianya Tambahan Penghasilan ASN	12	Bulan	71.734.200			100.800.000			48.640.002	12	64.000.000		59.196.416		48.260.000
		Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						27	Org/Bln							27	

4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola APBD	4 Org	70.200.000	4 Or g	74.990.000		75.000.000	5	70.187.000	4	74.952.000		75.000.000
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD					1 Do k						1	
5	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Org/ Bln	4.800.000	1 Or g/ Bln	4.800.000	1 Do k	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000	1	4.800.000
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya honor Pengelola BMD Perangkat Daerah	1 Org/ Bln	4.800.000	2 Or g/ Bln	4.800.000		4.800.000	1	4.800.000	2	4.800.000		4.800.000
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Do k						1	
6	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan	4 Org/ Bln	45.000.000	4 Or g/ Bln	45.000.000		-	4	45.000.000	3	36.250.000		-
6	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak Daerah	4 Org/ Bln	45.000.000		45.000.000		-	4	45.000.000	4	36.250.000		-
		Jumlah tenaga administrasi, penjaga malam, sopir dan tenaga kebersihan			4 Or g/ Bln						3			
8	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	333.580.010	100 %	300.415.300	100 %	257.469.000	100	329.664.367	100	297.044.896	100	255.534.175
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Buah	5.712.000	41 Bu ah	5.200.000		4.420.000	48	5.712.000	41	5.200.000		4.420.000
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					1 Pa ket						1	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87 Unit	72.744.210	17 Uni t	-		-	72	72.744.210	17	-		-
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan					8 Pa ket						8	
9	Penyediaan Bahan / Material	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bula n	1.518.000		2.518.000		-	12	1.518.000		2.518.000		-
		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bula n	17.805.000		22.481.000		19.800.000	12	17.805.000		22.481.000		19.800.000

10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			12 Bul an					12			
		Tersedianya Alat Tulis Kantor			12 Bul an					12			
		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Pa ket					3		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	155 Buku	1.391.500	155 Bu ku	-		-	155	1.391.500	155	-	-
			145 598 Lem bar	16.602.300		19.965.900			1	16.602.100		19.965.900	22.380.000
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					2 Pa ket					2	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Kabupaten, ke Provinsi dan Luar Provinsi	27 Kali	117.958.000	14 Kal i	187.858.000		145.113.000	27	117.332.000	14	187.273.700	145.113.000
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2 La por an					2	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan materai	99 Lem bar	990.000	209 Le mbar	1.495.000		1.500.000	99	984.000	209	1.494.500	1.500.000
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Belanja Air	42 M3	660.000		1.254.000		1.254.000	42	649.500		689.000	1.254.000
		Jumlah Belanja Listrik	320 0 KWH	6.960.000		11.762.400		12.702.000	3200	6.101.580		11.609.243	12.372.173
		Jumlah Langganan Internet	12 Bula n	6.756.000		6.756.000		5.400.000	12	4.380.252		4.935.553	5.176.002
		Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air			12 Bul an						12		
							1 La por an					1	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional	7 Unit	2.000.000	14 Uni t	2.000.000		2.400.000	7	1.962.225	14	1.753.000	1.019.000
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	40.000.000	1 Uni t	36.633.000		40.000.000	1	40.000.000	1	36.633.000	40.000.000
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					15 Uni t					15	

16	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan mesin lainnya	7 Unit	2.492.000	20 Unit	2.492.000		2.500.000	7	2.492.000	20	2.492.000		2.500.000
		Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara					16 Unit						16	
17	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Unit	39.991.000	1 Unit	-		-	1	39.990.000	1	-		-
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi					1 Unit						1	
	masuk indikator sasaran													
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Dok	-	3 Dok	-		-	3	-	3	-		-
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kali	-	1 Kali	-		-	2	-	1	-		-
III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Prosentase NPHD yang di laksanakan		630.608.000		620.608.000	1	13.301.926.800		612.991.789		602.975.789	1	10.394.115.789
		Prosentase partai politik yang diverifikasi			1 Dok				9		1			
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					4						4	

8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Prosentase NPHD yang di laksanakan 2. Prosentase partai politik yang diverifikasi 3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Dok	630.608.000	3	Dok	620.608.000		13.301.926.800	3	612.991.789	3	602.975.789		10.394.115.789
17	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase NPHD yang di laksanakan	11	dok	630.608.000		1	Berita Acara	13.301.926.800			612.991.789		602.975.789	1	10.394.115.789
	Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase partai politik yang diverifikasi	10	Dok	565.608.000	11	Dok	565.608.000		13.301.926.800	9	548.953.789	11	548.953.789		10.394.115.789
18	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1	dok	65.000.000		11	Usulan	-			64.038.000		54.022.000	11	-

IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATA N	Prosentase Ormas/LSM yang dibina	1 Dok	50.000.000	1 Do k	46.206.000		-	1	49.442.000	1	44.755.100		-
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas/LSM yang dibina	1 Dok	50.000.000	1 Do k	46.206.000		-	1	49.442.000	1	44.755.100		-
19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prosentase Ormas/LSM yang dibina	1 Dok	50.000.000		46.206.000		-	1	49.442.000		44.755.100		-
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 org	263.630.600		292.330.000		-	30	259.107.600		290.810.000		-
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30 org	263.630.600		292.330.000		-	30	259.107.600		290.810.000		-

20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas PencegahanPenyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	30	org	263.630.600		292.330.000		-	30	259.107.600		290.810.000	3	-
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		6	dok	116.999.800		165.164.650		308.523.000	6	115.993.800		117.110.850		284.911.000
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		6	dok	116.999.800		165.164.650		308.523.000	6	115.993.800		117.110.850		284.911.000
21	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3	dok	30.000.000		111.344.900		8.500.000	3	29.902.000		108.697.000		8.500.000

22	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 dok	86.999.800	4	53.819.750		300.023.000	3	86.091.800	4	8.413.850		276.411.000
			100 %	2.137.474.410	100 %	2.232.192.950	100 %	14.730.995.800	100	2.067.009.104	##	2.087.218.561	##	11.791.817.977

Berdasarkan hasil tabel 2.7 dapat dijelaskan realisasi anggaran Bapelitbangda selama tahun 2021-2023 dengan capaian di atas 97% dan capain kinerja sub kegiatan dengan realisasi 100%. untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja dan anggaran yang sudah optimal sebagai perwujudan dari perencanaan yang ideal.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Sasaran Layanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao yaitu Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao.

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Polri, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Pengadilan , Kejaksaan, Paopol, Ormas, Perguruan Tinggi, LSM, BPS, dan lain-lain.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROTE NDAO

3.1. Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol, maka dilaksanakan pemetaan permasalahan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang poltik yang baik, kondisi keamanan dan ketentraman yang kondusif serta kewaspadaan dini di daerah	Rendahnya pemahaman, kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;	Rendahnya kualitas SDM
		kurangnya pembinaan dan sosialisasi forum-forum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, belum adanya perda bidang Kesbangpol	Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan
			Terbatasnya data dan informasi
			Perencanaan program/kegiatan yang belum optimal Keterbatasan dana untuk mendukung program/kegiatan

3.2. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian

tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan- tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 berpedoman pada : 1) Hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi; 2) Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2019-2024, dan 3) Telaahan Rencana Strategis Direktorat Jenderal politik dan pemerintahan umum Tahun 2014-2019.

Terdapat 5 (lima) isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagai berikut :

1. Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan
3. Pembinaan Ketahanan Budaya ,Agama, Kemasyarakatan dan ekonomi
4. Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik dan Politik

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi, sedangkan sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

4.1. Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

4.1.1. Tujuan

Tujuan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Poilitik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini .

4.1.2. Sasaran

Sasaran yang dicapai oleh Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 adalah Terwujudnya Pembinaan politik, Kesatuan Bangsa dan Kewsapadaan Dini.

Tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao

NO	RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)		RENSTRA		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	SPM/IKK/LAINNYA	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
								REAL	TARGET			
	TUJUAN	SASARAN	TUJUAN	SASARAN				2023	2024	2025	2026	2026
	Meningkatnya Implementasi reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan publik				indeks kepuasan masyarakat	poin		92	93	94	96	96
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif di dukung oleh teknologi dan informasi										
			Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Poilitik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini	Terwujudnya Pembinaan politik, Kesatuan Bangsa dan Kewsapadaan Dini	Persentase Parpol yang di verifikasi	%		90	100	100	100	
					Persentase Ormas/LSM yang dibina	%		66	100	100	100	
					Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan kebangsaan	%		100	100	100	100	
					Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	%		100	100	100	100	

4.2. Cascading Kinerja Bakesbangpol Tahun 2025-2026

Mengacu dokumen RPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026, maka gambaran keterkaitan antara tujuan dan sasaran Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao, sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 sedangkan cascading kinerja Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertical dari tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator dan target seperti pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026

TUJUAN	SASARAN		PPROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT), DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA AWAL TAHUN 2024	TARGET KINERJA			UNIT KERJA/BIDANG
							TAHUN 2025	TAHUN 2026	KONDISI AKHIR KINERJA	
1	2		3	4		5	6	7	8	9
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Poilitik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini				Persentase Layanan Pembinaan Politik,Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini	%	100	100	100	100	
		I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Anggaran	%	100	100	100	100	Sekretariat
				Presentase Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	
				Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	100	100	
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok	14	21	19	40	
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	14	14	12	26	
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	7	7	14	
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Org/Bln	100	100	16	28	
		3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	16	32	16	28	
		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	49	49	4	53	
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dok	100	100	1	100	
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dok	24	24	1	25	
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	0	50	50	100	
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	2	
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	4	
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	2	

		5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan surat menyurat	Materai	150	150	150	300	
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	2	
		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	100	
		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	7	7	7	14	
		14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	Unit	7	7	7	14	
		15	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	Unit	0	1	1	2	
	Terwujudnya Pembinaan politik, Kesatuan Bangsa dan Kewaspadaan Dini			Cakupan Pembinaan Idiologi dan Wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	
	II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%	100	100	100	100	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%	100	100	100	100	
		7	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	%	100	100	100	100	
	III			Persentase Parpol yang di verifikasi						Bidang PPM Bidang PSDA Bidang IK
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN		Prosentase NPHD yang di laksanakan	%	100	100	100	100	
				Prosentase partai politik yang diverifikasi	%	100	100	100	100	
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	%	100	100	100	100	

		10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Prosentase NPHD yang di laksanakan 2. Prosentase partai politik yang diverifikasi 3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	12	0	0	0	
		22	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	Prosentase NPHD yang di laksanakan	Laporan	2	0	0	0	
		23	Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Prosentase partai politik yang diverifikasi	Laporan	10	10	10	20	
		24	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	1	1	1	1	
				Persentase Ormas/LSM yang dibina						
		IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas/LSM yang dibina	%	100	100	100	200	Bidang IK
		13	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas/LSM yang dibina	%	1	1	1	2	
		34	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prosentase Ormas/LSM yang dibina	%	1	1	1	2	
				Cakupan Pembinaan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi						

		V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	100	100	100	100	
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	40,00	41,00	42,00	42,00	
		14	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	%	1	1	1	2	
		35	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	%					
		36		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	%	1	1	1	1	
		15	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	%	100	100	100	100	

		37		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	%	100	100	100	200	
		16	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	%	100	100	100	200	
		38	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	%	100	100	100	200	
					%	100	100	100	100	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi. Strategi Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026 sebagai berikut:

5.1. STRATEGI

1. Peningkatan
2. Koordinasi dan Kerjasama
3. Penguatan
4. Konsolidasi
5. Pemantapan

5.2. KEBIJAKAN

1. Peningkatan pemahaman dan penguatan nilai-nilai Idiologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (empat konsensus nasional) dan Wawasan Kebangsaan.
2. Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial, terorisme dan radikalisme di daerah.
3. Peningkatan Pengawasan dan Penanganan Orang Asing, Lembaga Asing, kewaspadaan dini masyarakat dan penanganan konflik sosial.

4. Peningkatan koordinasi, kerjasama dan konsolidasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Peningkatan politik Cerdas dan Berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik bagi masyarakat.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2025-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembinaan Poilitik Kesatuan Bangsa & kewaspadaan Dini	Terwujudnya Pembinaan politik, Kesatuan Bangsa dan Kewsapadaan Dini	Peningkatan	Peningkatan Pemahaman dan penguatan nilai –nilai idiologi pancasila ,UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI(Empat Konsensus Nasional) Dan wawasan Kebangsaan
		Koordinasi & Kerjasama	Koordinasi Kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan FKUB, FPK, FKDD , instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik sosial , terorisme dan radikalisme di daerah
		Penguatan	Peningkatan Pengawasan dan Penanganan orang asing , lembaga asing dan Tenaga Kerja asing di daerah dan penangana konflik sosial
		Konsolidasi	Peningkatan koodinasi, kerjasama dan konsolidasi ketahanan seni , budaya agama , kemasyarakatan dan ekonomi untuk mewujudkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat
		Pemantapan	Peningkatan politik cerdas dan berintegritas melalui peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat dan penguatan peran partai poltik dalam melakukan pendidikan politik bagi Mayarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Bapelitbangda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program. Pemilihan program , kegiatan dan sub kegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program, kegiatan dan subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif untuk Tahun 2025-2026 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Serta Pendanaan Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025 – 2026

Tujuan	Sasaran		Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sa tu an	Target Tahun Awal		Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja PD Penanggu ng Jawab	Lokasi	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kond. KnjPd Akhir Periode Renstra PD				
						Tar get	Rp	Ta rg et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5		7	8	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatkan Kualitas Kinerja Pembi naan Poilitik Kesatu an Bangsa & kewas padaa n Dini	Terwujudnya Pembinaan Politik Kesatuan Bangsa dan Kewaspa daan Dini	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		100	1.249.488.400	100	1.261.983.000	100	1.274.602.000	100	2.536.585.000	Sekretariat		
				Presentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah		100		100		100						
				Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100		100		100						
				Presentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik		100		100		100						
		1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu		14	6.970.000	21	13.940.000	21	13.940.000	42	27.880.000			Kab. RN
		1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	do k	14	6.970.000	14	6.970.000	14	6.970.000	28	13.940.000			Kab. RN
		2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	do k	0	-	7	6.970.000	7	6.970.000	14	13.940.000			Kab. RN
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah tepat waktu		100	980.839.700	100	983.059.300	100	983.059.300	100	1.966.118.600	Kab. RN				
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	or an g	16	916.159.700	32	918.379.300	32	918.379.300	29	1.836.758.600	Kab. RN				

		4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	do k	49	64.680.000	49	64.680.000	49	64.680.000	98	129.360.000	Kab. RN
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyediaan administrasi BMD Perangkat Daerah tepat waktu		100	4.800.000	100	9.600.000	100	9.600.000	100	19.200.000	Kab. RN
		5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	do k	24	4.800.000	24	9.600.000	24	9.600.000	48	19.200.000	Kab. RN
		4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan Umum Perangkat Daerah		100	191.547.700	100	191.547.700	100	191.547.700	100	383.095.400	Kab. RN
		6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	pa ke t	1	4.355.000	1	4.355.000	1	4.355.000	2	8.710.000	Kab. RN
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	un it	0	-	50	-	50	-	100	-	Kab. RN
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	pa ke t	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000	2	39.600.000	Kab. RN
		9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	pa ke t	1	22.418.700	1	22.418.700	1	22.418.700	4	44.837.400	Kab. RN
		10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	pa ke t	1	144.974.000	1	144.974.000	1	144.974.000	2	289.948.000	
		5	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	20.851.000	100	19.356.000	100	19.356.000	100	38.712.000	Kab. RN
		11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan surat menyurat	do k	12	1.495.000	12	1.495.000	12	1.495.000	24	2.990.000	Kab. RN
		12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	pa ke t	1	19.356.000	1	19.356.000	1	19.356.000	2	38.712.000	Kab. RN

		6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara		100	44.480.000	100	44.480.000	100	57.099.000	100	101.579.000		Kab. RN
		13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	7	44.480.000	7	44.480.000	7	50.000.000	14	94.480.000		Kab. RN
		14	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	unit	1	-	1	-	1	3.000.000	2	3.000.000		Kab. RN
		15	Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rahabilitasi	unit	1	-	1	-	1	4.099.000	2	4.099.000		Kab. RN
		II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		100	676.501.000	140	683.266.000	100	690.098.000	100	1.373.364.000		
		7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		140	676.501.000	140	683.266.000	140	690.098.000	100	1.373.364.000	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa	
		16	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		140	676.501.000	140	683.266.000	140	690.098.000	280	1.373.364.000		

		III	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN	Prosentase NPHD yang di laksanakan	W	100	19.970.086.200	10 0	1.032.967.245	100	1.185.269.050	100	2.218.236.295	Bidang Politik Dalam Negeri	Kab. RN
				Prosentase partai politik yang diverifikasi				10 0		100		100			
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				5 0		50		200			
		8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1. Prosentase NPHD yang di laksanakan 2. Prosentase partai politik yang diverifikasi 3. Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	%	100	19.670.086.200	1 0 0	1.032.967.245	100	1.185.269.050	200	2.218.236.295		Kab. RN

		IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Prosentase Ormas/LSM yang dibina		15	13.270.000	15	13.402.000	15	13.536.000	30	26.938.000		Kab. RN
		9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase Ormas/LSM yang dibina		15	13.270.000	15	13.402.000	15	13.536.000	30	26.938.000	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya , Agama dan Organisasi masyaraka t	Kab. RN
		19	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Prosentase Ormas/LSM yang dibina		15	13.270.000	15	13.402.000	15	13.536.000	30	26.938.000		Kab. RN
		V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100	25.220.000	1 0 0	25.472.000	100	25.726.000	100	51.198.000	Bidang Ketahana n Ekonomi, Sosial Budaya , Agama dan Organisasi masyarak at	Kab. RN
		10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100	25.220.000	10 0	25.472.000	100	25.726.000	200	51.198.000		Kab. RN

		20	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		100	25.220.000	100	25.472.000	100	25.726.000	100	51.198.000	Kab. RN
		VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasanantar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	or an g	30	274.440.000	30	274.440.000	30	277.184.000	60	551.624.000	Kab. RN
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	la po ra n	12		12		12		24		

		11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	or an g	30	274.440.000	30	274.440.000	30	277.184.000	30	39.904.000		Kab. RN
				Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	la po ra n	12		12		12		12			
		21	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Or an g	30	18.580.000	10 0	18.580.000	100	21.324.000	100	39.904.000		Kab. RN

		22	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	La po ra n	12	255.860.000	12	255.860.000	12	255.860.000	12	511.720.000		Kab. RN
						100	22.209.005.600	100	3.291.530.245	100	3.466.415.050	100	6.757.945.295		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Indikator Kinerja merupakan sesuatu yang dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Indikator kinerja tujuan dan sasaran di tetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) sedangkan indicator penyelenggaraan urusan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah. Indikator kinerja ini merupakan indikatorindikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

7.1. Target tujuan dan sasaran Renstra Bakesbangpol Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja Bapelitbang, telah ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tabel 7.1 berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Tahun 2025-2026								
NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SAT	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
				REALISASI	TARGET			
				2023	2024	2025	2026	
1	Cakupan Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan	%	Jumlah Siswa yang dibina / Jumlah Siswa x 100	100	100	100	100	100
2	Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	Jumlah Ormas / LSM dan yang dibina / Jumlah Ormas / LSM x 100	66	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik Yang Diverifikasi	%	Jumlah parpol yang di verifikasi / Jumlah parpol x 100	90	100	100	100	100
4	Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	%	Jumlah Forum Umat Beragama yang dibina / Jumlah Forum Umat Beragama x 100	100	100	100	100	100

7.2. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bapelitbang Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bapelitbangda Tahun 2025-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tabel 7.2 berikut

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2026

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	FORMULA PENGUKURAN/PENJELASAN	KINERJA AWAL		TARGET CAPAIAN		KINERJA AKHIR RPD
				REALISASI	TARGET			
				2023	2024	2025	2026	2026
Permendagri 86/2017								
ASPEK PELAYANAN UMUM								
	PERENCANAAN							
1	Cakupan Pembinaan Idiologi Wawasan Kebangsaan	%	Jumlah Siswa yang dibina / Jumlah Siswa x 100	100	100	100	100	100
2	Persentase Ormas/LSM yang dibina	%	Jumlah Ormas / LSM dan yang dibina / Jumlah Ormas / LSM x 100	66	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik Yang Diverifikasi	%	Jumlah parpol yang di verifikasi / Jumlah parpol x 100	90	100	100	100	100
4	Cakupan Pembinaan Seni Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi	%	Jumlah Forum Umat Beragama yang dibina / Jumlah Forum Umat Beragama x 100	100	100	100	100	100
Permendagri 18/2020		Indikator LPPD						

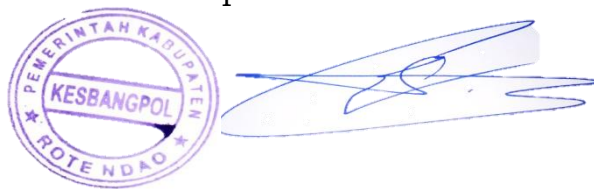
BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama 2 (dua) tahun ke depan. Renstra disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir pada tahun 2024 guna mendukung pencapaian dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menopang dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh Aparatur Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao Tahun 2025-2026. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya guna memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Semoga penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 dapat menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari Bakesbangpol Kabupaten Rote Ndao.

Baa, 30 Januari 2024

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Rote Ndao



Marthen Muskanan, S.Sos

Pembina Tk. I

Nip. 19701217 200312 1 006